

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dunia menganggap bahwa Amerika Serikat merupakan satu-satunya negara adidaya di dunia setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Dengan kekuatannya di berbagai sektor Amerika Serikat tampil dengan hegemoni yang tidak dapat dibantah dengan mudah oleh negara lain. Kemampuan Amerika Serikat ini didasari oleh berbagai kebijakan, baik kebijakan dalam negeri maupun luar negeri yang diatur secara selektif oleh pemerintah negaranya. Kuatnya politik luar negeri Amerika Serikat menjadikan negara ini sangat diperhitungkan di tatanan dunia internasional. Kekuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat ini didapatkan dari kekuatan nasionalnya yang sudah terlebih dahulu dibangun dengan baik. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa Amerika Serikat merupakan negara yang tinggi akan keseriusan dan komitmen dalam pemenuhan kepentingan nasional serta pembentukan tatanan geopolitiknya di dunia (Wardhana & Dugis, 2019).

Amerika Serikat merupakan negara yang terus menjadi perhatian dunia internasional dalam pemilihan dan penerapan kebijakan luar negerinya, yang mana kebijakan yang diterapkan kerap menjadi kontroversi dalam lingkup internasional. Penerapan kebijakan luar negeri ini kemudian menimbulkan gejolak pada tatanan politik dunia yang mengakibatkan tegangnya hubungan antara Amerika Serikat dengan negara-negara di dunia, khususnya negara yang memiliki wilayah berpotensi ekonomi maupun negara dengan kekuatan perekonomian yang besar.

Munculnya kekuatan-kekuatan baru dalam tatanan dunia internasional mengakibatkan Amerika Serikat mendapat ancaman dalam hegemoninya di

dunia internasional. Dalam menanggulangi pertumbuhan kekuatan-kekuatan baru ini Amerika Serikat terus menerapkan kebijakan yang dapat menguntungkan jalannya perekonomian maupun kepentingan keamanan negaranya, yang mana kebijakan-kebijakan ini kerap bersinggungan dan bertolak belakang dengan kebijakan negara berkekuatan baru tersebut. Bahkan dalam merespon suatu isu di suatu kawasan yang berkaitan dengan kekuatan-kekuatan baru ini, Amerika Serikat kerap memindahkan fokus besar kebijakannya pada kawasan tersebut (Amba, 2019).

Salah satu kawasan yang menjadi perhatian Amerika Serikat dalam kaitannya dengan kekuatan-kekuatan baru ini adalah wilayah Greenland yang ada di kawasan Arktik. Arktik sendiri merupakan sebuah kawasan berupa lautan dan daratan yang penuh dengan es yang berada di bagian paling utara bumi atau yang kerap disebut sebagai kutub utara. Kawasan ini juga kerap disebut dengan Lingkaran Arktik atau *Arctic Circle* yang mana dalam kawasan ini terdapat negara-negara Arktik yang meliputi Alaska (Amerika Serikat), Kanada, Finlandia, Greenland (Denmark), Islandia, Norwegia, Rusia dan Swedia. Hal yang perlu diketahui mengenai kawasan ini adalah adanya perubahan kondisi geologis dimana terjadi pengurangan es secara masif yang diakibatkan oleh perubahan iklim akibat pemanasan global. Terjadinya peristiwa ini melahirkan peluang-peluang untuk mengeksplorasi kawasan Arktik dengan lebih mudah (Puspita, 2020).

Sedangkan Greenland merupakan pulau terbesar di dunia dengan total wilayah 2166 juta km<sup>2</sup> dan memiliki populasi sebesar 56.000 orang. Wilayah ini merupakan wilayah jajahan Denmark yang kemudian mendapatkan hak untuk mengatur pemerintahannya sendiri pada tahun 2009 melalui *Act on Greenland Self-Government*. Aturan ini kemudian memperbolehkan Greenland untuk mengatur sistem politik, hukum dan sistem ekonominya sendiri. Pemerintah Denmark masih memegang andil dalam jalannya pemerintahan Greenland melalui kontrol urusan luar negeri, pertahanan, kebijakan moneter dan pemberian subsidi tahunan (Grønning, 2019).

Amerika Serikat sudah lama menganggap Greenland sebagai wilayah yang penting dan strategis. Tidak tanggung-tanggung bahkan sejak tahun 1867 Amerika Serikat sudah berupaya untuk melakukan pembelian wilayah ini setelah berhasil membeli wilayah Alaska dari Kekaisaran Rusia. Pada tahun 1946 Amerika Serikat kembali berupaya untuk membeli kawasan ini. Presiden Truman menawarkan US\$ 100 Juta dalam bentuk emas, tapi upaya ini sayangnya kembali ditolak oleh Denmark. Kepentingan Amerika Serikat tidak berhenti pada penolakan ini, melainkan Amerika Serikat terus membangun hubungannya dengan Greenland hingga berhasil berhasil membangun beberapa pangkalan militer di wilayah Greenland (Over The Circle, 2019). Hal ini diterapkan setelah kedua negara sepakat untuk menandatangani perjanjian *Defense of Greenland* pada tahun 1951. Dalam perjanjian ini Pemerintah Denmark sepakat untuk memberikan akses wilayah Greenland pada Amerika Serikat untuk melakukan berbagai tindakan militer dalam rangka melindungi wilayah ini terhadap pengaruh Uni Soviet (U.S., Department of State, 1983).

Dengan bergantinya zaman dan ancaman yang berbeda Amerika Serikat kembali berusaha fokus pada kepentingannya di Arktik, khususnya Greenland. Pada tahun 2019 Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat merencanakan untuk kembali mencoba untuk membeli wilayah Greenland dari Denmark. Hal ini pertama kali di dilaporkan oleh *The Wall Street Journal* yang melaporkan bahwa ide pembelian Greenland ini berulang kali diusulkan oleh Presiden Trump pada penasihat administrasinya (Haberman & Shear, 2019). Lebih lanjut, Presiden Trump juga menanyakan mengenai kesempatan dan kemungkinan apasaja yang dapat menguntungkan Amerika Serikat jika memiliki wilayah Greenland (Vivian, Ballhaus, Restuccia, & Bender, 2019). Dalam satu wawancaranya, Presiden Donald Trump mengonfirmasi benar bahwa administrasi pemerintahannya sedang mendiskusikan mengenai ide dan kemungkinan dari pembelian Greenland dari Denmark ini. Presiden Trump juga menambahkan bahwa Greenland merupakan daerah yang menarik secara

strategis dan pemerintahannya tertarik untuk mendiskusikan lebih lanjut (Neuman, 2019).

Rencana pembelian ini pada mulanya akan didiskusikan oleh Presiden Trump dengan Ratu Denmark pada kunjungannya ke Denmark yang direncanakan akan terjadi pada tanggal 2-3 September 2019. Namun, sebelum kunjungan ini dilakukan, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen lebih dahulu mengeluarkan pernyataan pada media jika Greenland tidak dijual dan dirinya tidak tertarik untuk membahas pembelian Greenland dengan Presiden Trump. Lebih lanjut, Perdana Menteri Frederiksen tetap ingin menjalin hubungan strategis dengan Amerika Serikat dalam kaitannya dengan kawasan Arktik yang semakin penting signifikansinya dalam tatanan dunia internasional. Menanggapi pernyataan ini Presiden Trump melalui akun Twitternya mengatakan bahwa dirinya akan menunda kunjungannya ke Denmark dan akan berkunjung pada lain waktu (Kiefer, 2019).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, penulis memiliki pemikiran untuk menganalisis apa yang menjadi alasan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengusulkan pembelian Greenland tahun 2019, dengan rumusan masalah **“Mengapa Presiden Amerika Serikat Donald Trump Mengusulkan Pembelian Greenland Dari Denmark?”**

## **C. Kerangka Pemikiran**

### **1. Konsep Politik Luar Negeri**

Politik luar negeri merupakan sikap dan bentuk komitmen suatu negara terhadap apa yang ada di luar wilayah negaranya. Politik luar negeri suatu negara digunakan sebagai strategi negara untuk mencapai kepentingan nasional yang harus dicapai diluar batas-batas wilayahnya. Politik luar negeri ini umumnya diterapkan pada

keputusan-keputusan yang diambil dalam kebijakan politik luar negeri suatu negara.

Dalam buku *The International Relations Dictionary* Jack C. Plano dan Roy Olton mendefinisikan politik luar negeri sebagai strategi atau tindakan yang dibuat oleh pembuat kebijakan suatu negara untuk merespon tindakan negara lain atau entitas internasional lainnya. Arah dan tujuan dari politik luar negeri ini tergantung dengan apa yang menjadi kepentingan nasional negara pembuat kebijakan (Plano & Olton, 1999).

## 2. Konsep Kepentingan Nasional

Konsep ini menjelaskan bahwa kebutuhan negara atau kepentingan nasional suatu negara harus dicapai demi keberlangsungan hidup suatu negara. Kepentingan nasional merupakan cita-cita suatu negara yang menjadi tujuan yang ingin dicapai negara tersebut. Kepentingan nasional suatu negara dapat dilihat dari baik buruknya kondisi internal negara tersebut, baik pada sektor ekonomi, politik, maupun keamanan. Keberhasilan suatu negara menjalankan kepentingannya berdampak langsung pada stabilnya kondisi negara di berbagai sektor.

Hans J. Morgenthau menjelaskan bahwa kepentingan nasional merupakan kemampuan minimum suatu negara dalam melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik dan kultur dari intervensi negara lain. Dari penjelasan tersebut, pemimpin negara di seluruh dunia kemudian menerbitkan kebijakan sebagai sikap terhadap negara lain, baik yang sifatnya kerjasama atau konflik (Morgenthau, 1951)

Salah satu alasan terkuat suatu negara dalam melakukan interaksi dengan aktor-aktor dalam hubungan internasional adalah kepentingan nasional. Menurut, Morgenthau, kepentingan nasional

merupakan usaha suatu negara untuk mendapatkan kekuasaan, dimana kekuasaan merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan suatu negara untuk memelihara kendali terhadap negara lain. Kekuasaan dan kepentingan merupakan tujuan dari tindakan politik internasional (Nye, 2005)

Menurut Donald E. Nuechterlein, terdapat empat kepentingan fundamental yang membagi kepentingan nasional suatu negara, yaitu:

1. Kepentingan Pertahanan (*Defense of Homeland*): “*The protection in the nation state and citizen from the threat of physical violence by another country and or protection from an externality inspired threat to national political system*”. Melindungi wilayah dan warga negaranya dari ancaman berupa kekerasan fisik maupun kerusakan sistem politik yang dilakukan oleh negara lain.
2. Kepentingan Ekonomi (*Economic Well-being*): “*Enhancement of national interest economic well-being in relation with other countries*”. Mengembangkan perekonomian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi negara.
3. Kepentingan Tatanan Dunia (*Favorable World Order*): “*The maintenance of an international politics and international system in citizen and operate peacefully outside their own borders*”. Mempertahankan kekuatan politik dan hegemoni internasional hingga merasa pada tahap aman dan terciptanya rasa terlindungi.
4. Kepentingan Ideologi (*Promotion of Values*): “*The protection and furtherance of set values with the citizen of a nation state and believe to be universality good*”. Melindungi

dan mempertahankan ideologi negara dari berbagai ancaman dari negara lain (Nuechterlein, 1976)

Dalam penelitian ini, penulis ingin mencoba menjelaskan bahwa yang menjadi tujuan utama Amerika Serikat adalah kepentingan ekonomi dan kepentingan tatanan dunia. Seiring dengan timbulnya isu perubahan iklim dan pemanasan global, wilayah Greenland yang tertutup es abadi perlahan-lahan membuka peluang yang sebelumnya tidak terlihat. Dalam rangka mencari sumber pendapatan dan terus mengembangkan perekonomiannya serta agar tetap menjadi dominator perekonomian global, Greenland menjadi sasaran bagi Amerika Serikat untuk mencapai kepentingan ini.

Dalam rangka mempertahankan hegemoni di dunia internasional, Amerika Serikat berupaya untuk membendung ancaman-ancaman dari negara lain yang ingin merebut kekuasaan tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa Amerika Serikat juga ingin memperoleh kepentingan tatanan dunianya.

Amerika Serikat melihat bahwa Greenland memiliki potensi yang besar dalam sumber daya alam serta jalur perdagangan baru, selain itu Amerika Serikat sadar bahwa kekuatan baru seperti Cina mulai bangkit dan perlahan menggeser hegemoninya di tatanan dunia internasional. Maka dari itu untuk membendung pengaruh dan upaya dominasi Cina di kawasan ini, wilayah Greenland harus dikuasai oleh Amerika Serikat dengan cara menerapkan kebijakan yang kontra akan kebijakan negara lain dan menetapkan dominasinya di kawasan ini. Beberapa strateginya adalah dengan memperbarui pangkalan militer, memberikan bantuan ekonomi, serta membuka kembali konsulat di negara tersebut. Strategi tersebut dilakukan demi membendung intervensi negara lain yang juga melihat kesempatan baru pada negara tersebut, terutama setelah Cina mulai bangkit di

tatanan dunia internasional dan mencoba untuk hadir di kawasan Greenland.

#### **D. Hipotesa**

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengusulkan membeli wilayah Greenland dari Denmark karena:

1. Secara ekonomi Amerika Serikat ingin mengambil potensi ekonomi yang terbuka dengan mencairnya es serta memaksimalkan keuntungan ekonomi dari kawasan Greenland.
2. Secara tatanan dunia Amerika Serikat ingin menekan dan memblokir bangkitnya kekuatan baru yang ingin mengintervensi wilayah Arktik serta mempertahankan hegemoni Amerika Serikat agar tidak terganggu dengan cara menerapkan kebijakan-kebijakan defensif serta menetapkan dominasinya di kawasan Greenland.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui kondisi hubungan AS dengan Greenland dalam sektor keamanan di wilayah Arktik.
2. Menganalisa kepentingan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam upaya pembelian Greenland.

#### **F. Batasan Penelitian**

Penulisan penelitian ini mempunyai jangkauan penelitian pada tahun 2017-2020. Hal ini berdasarkan atas masa jabatan Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat.



## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pengumpulan Data**

Peneliti menggunakan metode kualitatif yang lebih menekankan pada penelitian kepustakaan atau library research. Data-data yang diperoleh merupakan data sekunder yang diperoleh dari media cetak maupun elektronik berupa jurnal, artikel web, buku, surat kabar dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan objek penelitian dan dapat menunjang jalannya proses penelitian.

### **2. Metode Analisis Data**

Penulis menggunakan teknik analisa induktif yang mengacu pada pemahaman fakta. Teknik ini diawali dengan pengumpulan fakta-fakta yang berkaitan dengan objek penelitian. Kemudian fakta-fakta tersebut dirubah menjadi generalisasi. Dari generalisasi yang didapat, dilakukan proses perumusan konsep dan kemudian dilakukan induksi teori (Mas'ood, 1990)

## **H. Sistematika Penulisan**

Dalam menulis penelitian ini, penulis akan membagi pembahasan ke dalam empat bab yang terdiri dari:

### **1. BAB I**

Berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Pemikiran, Hipotesa, Jangkauan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **2. BAB II**

Bab ini menjelaskan bagaimana kondisi kebijakan luar negeri Amerika Serikat di sektor keamanan serta hubungan Amerika Serikat dengan Greenland dalam sektor keamanan di wilayah Artik.

### 3. BAB III

Dalam bab ini penulis mencoba untuk menjelaskan tentang alasan pemerintah Amerika Serikat di era pemerintahan Presiden Donald Trump mencoba untuk membeli wilayah Greenland dari Denmark serta strategi yang diterapkan oleh Amerika Serikat untuk menjalin hubungan baik dengan pemerintah Greenland.

### 4. BAB IV

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan atas keseluruhan isi penelitian yang sudah ditulis.